

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, dan Hafid, Muhammad, 2011, *Akta Perbankan Syariah yang Selaras Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Pustaka Zaman, Jakarta.
- Black, M. A., Henry Compbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- Chazawi, Adami, 2014, *Bagian 2 Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Masyhur, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya.
- H. R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Kelima*, Grafiti Budi Utami, Bandung.

Ibrahim, Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.

Kelsen, Hans, 2006, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

Kie, Tan Thong, 1994, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II)*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhamad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Poerwadarminta, W. J. S., 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Purnomosidi, Arie, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, Wawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum dan PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Sistem Hukum Nasional*, PP IPPAT.

Sianturi, S. R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta,

\_\_\_\_\_, dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R., 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.

Subekti, R., 2007, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Suherman, E., 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria S. W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryani dan Hendriyadi, 2016, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Triwulan, Titik, dan Febrian, Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yusuf, A. Muri, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, *Burgerlijke Wetboek Stbl.* 1847 Nomor 237.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, *Wetboek van Strafrecht, Staatsblaad* Tahun 1915 Nomor 732, berdasarkan Undang-undang Tahun 1946 Nomor 1 tentang Hukum Pidana, Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 29-30 Mei 2015.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 185 PK/Pid/2010 tertanggal 20 April 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/PID/2003/PT.Y tertanggal 15 Januari 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/2003/PN.Yk tertanggal 03 Juli 2003.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 102/PID/2017/PT YYK tertanggal 16 Januari 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smn tanggal 14 November 2017.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

### **C. Karya Ilmiah**

Arlingga, Debby Dwi, 2018, "Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003/K/Pid/2015)", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Hanavia, Evie, 2017, "Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik tanpa Dihadiri oleh Para Pihak", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

#### **D. Jurnal**

Priono, Agus, Juli-Desember 2015, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut serta Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik yang Dilakukan Notaris*”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. III No. 2.

Wiradiredja, Hilda Sophia, Februari 2015, “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1.

#### **E. Internet**

<https://kbbi.web.id/degradasi>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

<https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

<https://kbbi.web.id/residivis>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

<http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/Notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<https://wartahukum.id/Notaris-hamdani-dituduh-memalsu-proses-jual-beli-tanah-senilai-rp700-juta/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<https://wartahukum.id/hakim-ayun-kristanto-tolak-keberatan-oknum-notaris-hamdani/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<http://artikelddk.com/doleus-delicten-delik-dolus-dan-culpose-delicten-delik-culpa/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.